



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum SKPD

Dinas Kelautan Dan Perikanan Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 162 Tahun 2001 tanggal 13 April 2001. Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Barat secara umum merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Pembangunan Nasional dimana sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan pada sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Barat sejalan dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional yang kemudian secara hierarkis dituangkan kedalam kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Provinsi dan urusan pembantuan yang di berikan oleh Pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.

Kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tertuang dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Bagan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UPTD

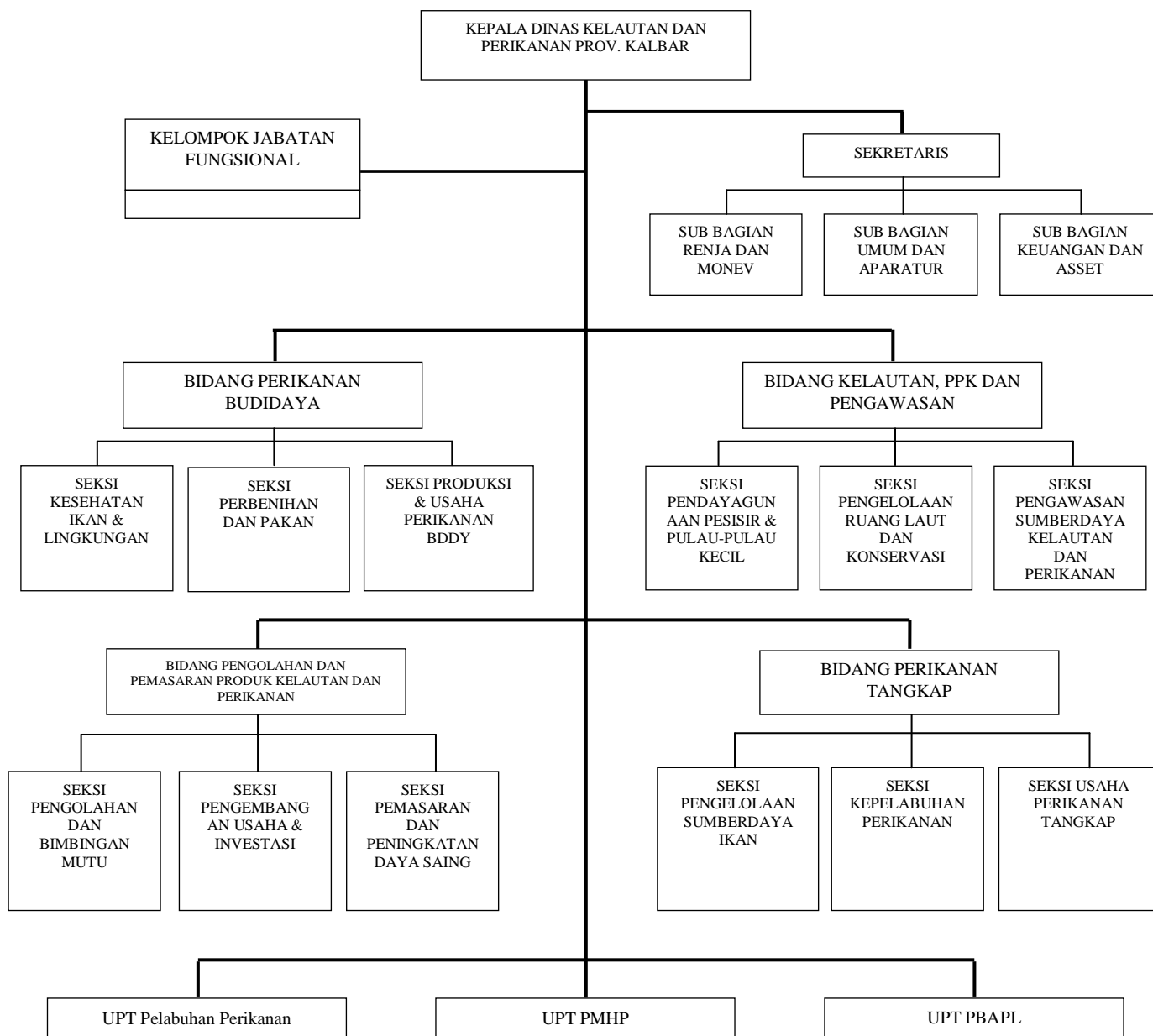
Bagan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini (*sesuai perda no. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat*)



Tabel. 1

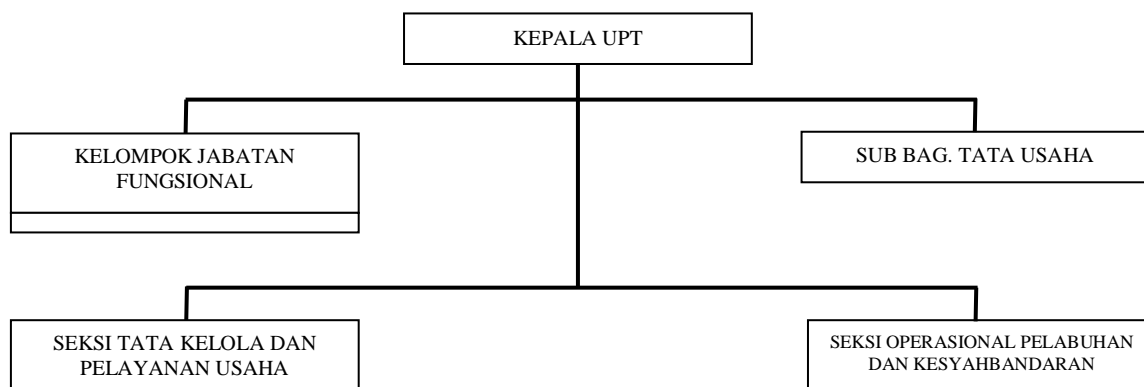
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR

(Sesuai Pergub Nomor 114 Tahun 2016)

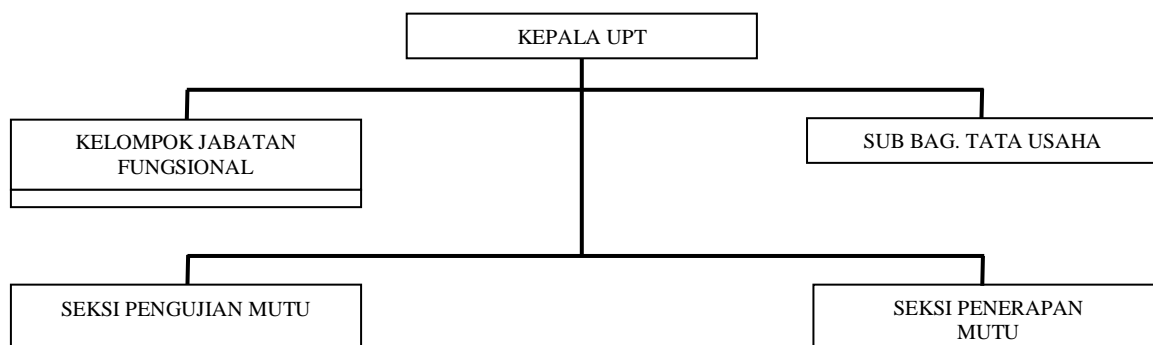




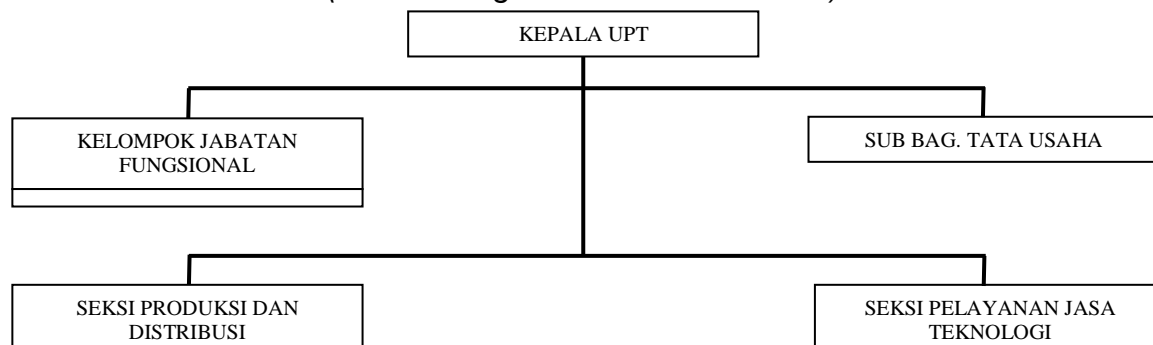
STRUKTUR ORGANISASI UPT PELABUHAN PERIKANAN
(Sesuai Pergub No. 89 Tahun 2017)



STRUKTUR ORGANISASI UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (UPT - PMHP)
(Sesuai Pergub No. 90 Tahun 2017)



STRUKTUR ORGANISASI UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT (UPT PBAPL)
(Sesuai Pergub No. 91 Tahun 2017)





C. Gambaran Umum SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana berikut :

- Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :
 - Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan ;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
 - Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan ;
 - Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
 - Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan ;
 - Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.



2. Tugas Pokok dan Fungsi UPT SKPD

a. UPT Pelabuhan Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan di bidang pelabuhan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan program kerja UPT Pelabuhan Perikanan;
- b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum, pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UPT Pelabuhan Perikanan;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan (sandar dan tambat labuh) kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan di pelabuhan perikanan;
- f. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan log book, pelayanan bongkar muat produk perikanan;
- h. Pelaksanaan pengawasan pelayanan penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
- i. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- j. Pelaksanaan pelayanan tugas kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- k. Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, perkarantinaan ikan, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang pelabuhan perikanan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.



b. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang pengujian dan penerapan mutu produk perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan program kerja UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Penerapan mutu Hasil Perikanan;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang keamanan pangan hasil perikanan;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis menguji ketelitian dan kecermatan pekerjaan laboratorium;
- g. Pelaksanaan kegiatan teknis pengujian ketelitian dan kecermatan pekerjaan laboratorium;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengujian dan penerapan mutu produk perikanan;
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang penerapan mutu hasil perikanan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

c. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang perikanan budidaya air payau dan laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan program kerja UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut



- b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum, pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang produksi dan distribusi;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan jasa teknologi;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penyediaan induk dan benih unggul ikan air payau dan laut yang bersertifikasi;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis penerapan hasil pengembangan aplikasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
- g. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan pelayanan pengujian laboratorium secara mikrobiologis, organoleptik, kimia dan fisika terhadap kualitas air dan lingkungan budidaya ikan air payau dan laut;
- h. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyediaan induk unggul ikan air payau dan laut dalam rangka menunjang kegiatan unit pembenihan ikan air payau dan laut;
- i. Pelaksanaan pelayanan teknis perbenihan dan budidaya air payau dan laut;
- j. Pelaksanaan pelayanan teknis sertifikasi mutu benih ikan air payau dan laut;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut;
- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang perikanan budidaya air payau dan laut yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019 berjumlah 141 orang yang terdiri dari 99 orang berjenis kelamin laki-laki dan 42 orang berjenis kelamin perempuan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2. Jumlah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan prov. Kalbar berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional TA. 2019

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL		STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-	Pembina Utama	-	-	Esselon I/b	-	-
S2	16	Org	Pembina Utama Madya	-	-	Esselon II/a	1	Org
S1/DIV	61	Org	Pembina Utama Muda	1	Org	Esselon II/b	-	-
DIPLOMA III	16	Org	Pembina Tingkat I	5	Org	Esselon III/a	5	Org
DIPLOMA II	-	Org	Pembina	9	Org	Esselon III/b	3	Org
SMA/SMK	42	Org	Penata Tingkat I	39	Org	Esselon IV/a	22	Org
SMP	3	Org	Penata	10	Org	Esselon IV/b	-	Org
SD	3	Org	Penata Muda Tingkat I	27	Org	Fungsional Widyaaiswara	-	-
			Penata Muda	7	Org	Fungsional Auditor	-	-
			Pengatur Tingkat I	25	Org	Fungsional Kepegawaian	-	-
			Pengatur	11	Org	Fungsional Arsiparis	-	-
			Pengatur Muda Tingkat I	3	Org	Dokter	-	-
			Pengatur Muda	-	Org	Bidan/Perawat	-	-
			Juru	4	Org	Fungsional Pranata Komputer	-	-
						Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	6	Org
						Fungsional Umum /Pelaksana	104	Org
JUMLAH	141	Org	JUMLAH	141	Org	JUMLAH	141	Org

Sumber: DUK Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

Adapun daftar pegawai per golongan, per jabatan dan per tingkat pendidikan secara rinci Tahun 2019 sebagaimana *terlampir*.

E. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan, telah tersedia gedung kantor dengan luas yang memadai namun kualitas gedung perlu ditingkatkan, adapun perlengkapan dan kondisinya masih baik (struktur gedung mengalami perubahan/penurunan), berikut sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan:



Tabel 3. Data Inventaris Asset

No.	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH AKHIR Desember 2019		KONDISI
		Jumlah		
		Barang	Nilai (Rp.)	
1	2	3	4	5
1	TANAH (KIB A)	18	669.330.735	Baik
2	PERALATAN DAN MESIN (KIB B)	878	17.448.345.332	Baik
3	GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)	42	7.104.473.349	Baik
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D)	7	706.712.355	Baik
5	ASET TETAP LAINNYA (KIB E)	8	104.438.872	Baik
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KIB F)	-	-	
	Jumlah	953	26.033.300.643	

Sumber data : Data Sementara Daftar Inventaris 2019



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat

Program dan Kegiatan perangkat daerah merupakan manifestasi atas visi, misi, dan program kerja Gubernur, sehingga perencanaan pembangunan daerah lima tahunan perangkat daerah harus disusun selaras dengan visi dan misi gubernur terpilih periode 2018 – 2023 serta mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional.

Sebagaimana tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023, Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 - 2023 adalah :

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan,



pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka **MISI** pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.



5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

B. Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar Tahun 2018 – 2023

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealistik – mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil ;
2. Jangkauan jauh kedepan – dicapai dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi;
3. Abstrak - belum tergambar dalam angka (kualitatif), upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung terus menerus/ berkesinambungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan **TUJUAN berdasarkan Misi ke-4 "Mewujudkan Masyarakat Sejahtera"** sebagai berikut :

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi Perikanan
3. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan. **Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :**



1. Meningkatkan Produksi Dan Pendapatan Nelayan Dengan Mendorong Tumbuh Berkembangnya Investasi dan Usaha Perikanan Tangkap Provinsi Kalbar Secara Lestari Dan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Pelayanan dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalbar
3. Meningkatkan Produksi dan Pendapatan Pembudidaya Ikan Dengan Mendorong Tumbuh Berkembangnya Investasi Dan Usaha Perikanan Budidaya Provinsi Kalbar Secara Lestari Dan Berkelanjutan
4. Meningkatkan Pelayanan Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Dan Laut Provinsi Kalbar
5. Peningkatan Konsumsi Ikan dan Daya Saing Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar di Pasar Global
6. Meningkatkan Pelayanan dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalbar
7. Melindungi dan menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan agar lestari dan berkelanjutan serta Melindungi hak ulayat dan mendorong kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan stake holder Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar
8. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap per uu yang berlaku dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kalbar agar tetap lestari dan berkelanjutan

C. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi pengelolaan dan pemanfaatan urusan kelautan dan perikanan diarahkan kepada peningkatan produksi dan daya saing komoditas produk hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak terhadap meningkatnya konsumsi ikan pada masyarakat Kalbar per kapita per tahun, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan; nelayan, pembudidaya ikan, pengolah serta pemasar komoditas produk hasil perikanan dan berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kelautan dan perikanan.



Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
2. Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif;
3. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor;
4. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut;
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan mata pekerjaan yang diambil oleh pemerintah dalam lingkup tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah Sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional dan Daerah, dasar kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan selain bertumpu pada landasan idiil Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 45, juga pada landasan Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2018 – 2023. Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dicapai. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran adalah dengan menentukan kebijakan.

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan diarahkan pada :

1. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan Sarana Prasarana , Inovasi Teknologi Tepat Guna, peningkatan Kualitas SDM serta pengembangan kelembagaan bidang perikanan tangkap
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, Intensifikasi budidaya ikan air



- payau dan laut, pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal, peningkatan sarana dan prasarana serta Pengembangan produksi benih unggul tahan penyakit
3. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan konsumsi ikan, peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien.
 4. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir
 5. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan

D. Program Nasional yang Dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

Dari 9 (sembilan) Program Nasional dan 5 (lima) yang diakomodir di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sesuai kewenangan

Jumlah program nasional (RKP), sebanyak 9 Program

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
2. Program Dukungan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kelautan dan Perikanan
3. Program Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
6. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
7. Program Pengelolaan Ruang Laut
8. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 Program sesuai kewenangan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



E. Standar Pelayanan Umum (Standar Operational Procedur “SOP”) Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

1. Penetapan SOP

SOP ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas no. 84 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019

2. Jumlah SOP (Teknis) Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar Daftar SOP teknis yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar berjumlah 63 (enam puluh tiga) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. Penanganan Keberatan Informasi Publik
3. Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
4. Fasilitasi Sengketa Informasi
5. Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik
6. Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
7. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
8. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan
9. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan
10. Pelayanan Floating Repair
11. Masuk Pelabuhan Perikanan Security Dan Keamanan Aset
12. Kebersihan Lingkungan Pelabuhan Perikanan
13. Jasa Pengadaan Air Bersih
14. Pas Masuk Pelabuhan Harian
15. Pas Masuk Pelabuhan Perikanan Berlangganan
16. Penumpukan Barang
17. Sewa Lahan (Tanah) dan Bangunan
18. Penggunaan Crane House dan Crane Beroda
19. Inspeksi Pembongkaran Ikan
20. Pelayanan Logbook Penangkapan Ikan
21. Pelayanan Pengawasan Mutu
22. Monitoring dan Pengambilan Sampel Residu
23. Penilaian/Audit CPIB
24. Penilaian/Audit CBIB
25. Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)
26. Penjualan Ikan
27. Penyediaan Induk Ikan/Udang
28. Penyediaan Benih/Benur
29. Fasilitasi Magang
30. Penyediaan Hasil Uji Laboratorium



31. Penerbitan Sertifikat Magang
32. Penerimaan Sampel Uji
33. Pengujian Boraks
34. Pengujian Mikrobiologi Angka Lempeng Total (ALT)
35. Pengujian Mikrobiologi Escheria Coli
36. Pengujian Mikrobiologi Vibrio Cholerae (Metode Chemwel)
37. Pengujian Mikrobiologi Vibrio Parahaemolyticus
38. Pengujian Mikrobiologi Stapylococcus Aureus
39. Pengujian Organoleptik
40. Uji Suhu Pusat Ikan
41. Pengujian Fisika (Bobot Tuntas)
42. Pengujian Mikrobiologi Coliform
43. Bidang Pengujian Membran Filter (Kualitas Air Intercocci Intestinal)
44. Membran Filter Coliform
45. Membran Filter Escheria Coli
46. Pengujian Mikrobiologi Salmonella
47. Pengujian Listeria
48. Mikrobiologi Sampel Umum
49. Validasi Dan Verifikasi Metode Pengujian
50. Pengujian Uji Profiensi
51. Pengujian Kadar Garam
52. Pengujian Kadar Abu
53. Pengujian Kadar Air
54. Pengujian Kadar Lemak Total
55. Pengujian Kadar Protein
56. Pengujian Kadar Logam Berat Kadmium (Cd)
57. Pengujian Serat Kasar
58. Pengujian Kadar Logam Berat Timbal (Pb)
59. Pengujian Kadar Logam Berat Merkuri (Hg)
60. Pengujian Residu Antibiotik Chlorampericol (Cap)
61. Pengujian Formalin
62. Pengujian Residu Antibiotik Aoz
63. Pengujian Residu Antibiotik Amoz

F. Kesesuaian Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2019

1. Ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2019

Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang tertera pada *tabel 4*.



2. Perda Pelaksanaan Peraturan Menteri

Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2038



Tabel 4. Kesesuaian Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2019

No.	Program &Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	√	√	√	√	√	√
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	√	√	√
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	√	√	√	√	√	√
c	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Negara	√	√	√	√	√	√
d	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	√	√	√	√	√	√
e	Penyediaan jasa administrasi keuangan	√	√	√	√	√	√
f	Penyediaan jasa kebersihan kantor	√	√	√	√	√	√
g	Penyediaan alat tulis kantor	√	√	√	√	√	√
h	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	√	√	√	√	√	√
i	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	√	√	√
j	Penyediaan bahan bacaan dan per UU	√	√	√	√	√	√
k	Penyediaan makanan dan minuman	√	√	√	√	√	√
l	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	√	√	√	√	√	√
m	Penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor,rumah jabatan, pendukung perkantoran	√	√	√	√	√	√

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019



No.	Program & Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
	lainnya						
n	Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang	√	√	√	√	√	√
o	Penyediaan jasa publikasi / iklan dan dokumentasi	√	√	√	√	√	√
p	Penyediaan Informasi SKPD melalui Media Cetak dan Elektronik	√	√	√	√	√	√
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	√	√	√	√	√	√
a	Pembangunan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	√	√	√	√	√	√
b	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	√	√	√	√	√	√
c	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	√	√	√	√	√	√
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	√	√	√	√	√	√
e	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	√	√	√	√	√	√
f	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus	√	√	√	√	√	√
g	Pemeliharaan Taman/Lahan Kantor/Halaman Rumah Jabatan	√	√	√	√	√	√
h	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	√	√	√	√
i	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas	√	√	√	√	√	√

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019



No.	Program & Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
	Angin						
j	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	√	√	√	√	√	√
k	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	√	√	√	√	√	√
l	Pembangunan Plank Nama Kantor	√	√	√	√	√	√
m	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus	√	√	√	√	√	√
n	Pengadaan Meubelair	√	√	√	√	√	√
o	Pengadaan Taman	√	√	√	√	√	√
p	Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telpon	√	√	√	√	√	√
q	Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	√	√	√	√	√	√
r	Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator	√	√	√	√	√	√
s	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin pompa Air	√	√	√	√	√	√
t	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Jabatan	√	√	√	√	√	√
u	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	√	√	√	x	x	√
v	Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	√	√	√	√	√	√
w	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	√	√	√	x	x	√
x	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	√	√	√	√	√	√
y	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan	√	√	√	√	√	√

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019



No.	Program &Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kantor / Rumah Jabatan						
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	√	√	√	√	√	√
a	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	√	√	√	√	√	√
b	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	√	√	√	√	√	√
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	√	√	√	√	√	√
a	Pendidikan dan Pelatihan	√	√	√	√	√	√
b	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	√	√	√	√	√	√
c	Pembinaan Jasmani dan Rohani	√	√	√	√	√	√
d	Penyusunan Analisis Jabatan	√	√	√	√	√	√
e	Penyusunan Penetapan Kinerja	√	√	√	√	√	√
f	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	√	√	√	√	√	√
V	Program Pengembangan dan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
a	Penyusunan Laporan Keuangan	√	√	√	√	√	√
b	Penyusunan Lakip	√	√	√	√	√	√
c	Penyusunan Renstra	√	√	√	√	√	√
d	Penyusunan Renja SKPD	√	√	√	√	√	√
e	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	√	√	√	√	√	√

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019



No.	Program & Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
f	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	√	√	√	√	√	√
g	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	√	√	√	√	√	√
h	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	√	√	√	√	√	√
i	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	√	√	√	√	√	√
VI	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	√	√	√	√	√	√
a	Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset	√	√	√	√	√	√
VII	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	√	√	√	√	√	√
a	Pemantauan dan Pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)	√	√	√	√	√	√
b	Pemantauan dan Pembinaan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)	√	√	√	√	√	√
c	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya di Kabupaten Sambas	√	√	√	√	√	√
d	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya di Kabupaten Kubu Raya	√	√	√	√	√	√
e	Pemantauan dan pengendalian hama, penyakit dan residu di kawasan usaha perikanan budidaya	√	√	√	√	√	√
f	Pemantauan dan pengendalian obat-obatan dan pakan untuk usaha perikanan budidaya	√	√	√	√	√	√



No.	Program & Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
g	Penyediaan Benih Unggul	√	√	√	√	√	√
h	Penyediaan Pakan Ikan	√	√	√	√	√	√
i	Rapat Koordinasi Teknis Perikanan Budidaya	√	√	√	√	√	√
j	Percontohan Budidaya Rumput Laut (DAK)	√	√	√	√	√	√
k	Percontohan Budidaya Ikan Laut (DAK)	√	√	√	√	√	√
l	Peningkatan Wawasan Adopsi Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut	√	√	√	√	√	√
m	Fasilitasi Magang Budidaya Air Payau dan Laut	√	√	√	√	√	√
n	Peningkatan Mutu Hasil Budidaya Air Payau dan Laut	√	√	√	√	√	√
o	Pembenihan Udang Vannamei	√	√	√	√	√	√
p	Pembenihan Udang Windu	√	√	√	√	√	√
q	Pembenihan Ikan Bandeng	√	√	√	√	√	√
r	Pembenihan Ikan Nila Salin	√	√	√	√	√	√
s	Pembesaran Udang Vannamei	√	√	√	√	√	√
t	Pembesaran Udang Windu	√	√	√	√	√	√
u	Pembesaran Ikan Nila Salin	√	√	√	√	√	√
v	Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan	√	√	√	√	√	√
VIII	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	√	√	√	√	√	√
a	Pengumpulan dan Analisa Data Produktifitas Perikanan Tangkap	√	√	√	√	√	√



No.	Program & Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
b	Penyediaan Sarana Pendukung Perlindungan dan Pengkayaan Sumber Daya Ikan Perikanan Tangkap	√	√	√	√	√	√
c	Penyediaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	√	√	√	√	√	√
d	Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	√	√	√	√	√	√
e	Penyediaan Mesin Kapal Perikanan	√	√	√	√	√	√
f	Pengendalian Usaha di Bidang Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan	√	√	√	√	√	√
g	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	√	√	√	√	√	√
h	Rapat Koordinasi Teknis Perikanan Tangkap	√	√	√	√	√	√
i	Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pengembangan Pelabuhan Perikanan	√	√	√	√	√	√
j	Pengolahan Data dan Informasi Perikanan Tangkap	√	√	√	x	x	√
k	Pelayanan Pengamanan di Lingkungan Pelabuhan Perikanan	√	√	√	√	√	√
l	Pelayanan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Data dan Publikasi	√	√	√	√	√	√
m	Pelayanan Teknis Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	√	√	√	√	√	√
n	Pelayanan Pengawasan Pengisian Bahan Bakar dan Inspeksi Pembongkaran Ikan	√	√	√	√	√	√
o	Pelayanan Teknis Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan	√	√	√	√	√	√



No.	Program & Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
p	Pelayanan Pembinaan Mutu Ikan di atas Kapal dan Distribusi Hasil Perikanan di Pelabuhan	√	√	√	√	√	√
q	Pelayanan Jasa Pemanfaatan Lahan dan Fasilitas Usaha Pelabuhan se Kalbar	√	√	√	√	√	√
r	Pembinaan Logbook Kapal Perikanan	√	√	√	√	√	√
s	Peningkatan Wawasan Petugas Pelabuhan Perikanan	√	√	√	√	√	√
IX	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√	√
a	Rapat Teknis Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√	√
b	Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Perikanan (Tangkap, Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan)	√	√	√	√	√	√
c	Gelar Operasi Kapal Pengawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	√	√	√	√	√	√
d	Bimtek Kelompok Masyarakat Pengawas SDI Kalbar	√	√	√	√	√	√
e	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas Perikanan	√	√	√	√	√	√
f	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√	√



No.	Program &Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	√	√	√	√	√	√
a	Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan Melalui Inovasi Menu dan Lomba Masak Berbahan Utama Ikan	√	√	√	√	√	√
b	Monitoring Unit Pengolah Ikan (UPI) ke Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
c	Pengembangan dan Pembinaan Sentra Pengolahan	√	√	√	√	√	√
d	Promosi Produk Hasil Perikanan ke Dalam dan Luar Negeri/BIMB EAGA	√	√	√	√	√	√
e	Peningkatan Konsumsi Ikan Melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	√	√	√	√	√	√
f	Pengembangan dan Peningkatan Sarana/Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√	√
g	Pengelolaan Perizinan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	√	√	√	√	√	√
h	Pengembangan Produk Olahan dan Pemasaran Berdaya Saing	√	√	√	√	√	√
i	Pengujian Profiensi	√	√	√	√	√	√
j	Survailen Laboratorium Akreditasi	√	√	√	√	√	√
k	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi	√	√	√	√	√	√



No.	Program &Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
l	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia	√	√	√	√	√	√
m	Pengadaan Media Reagensia	√	√	√	√	√	√
n	Audit Internal ISO Guide 01-17025	√	√	√	√	√	√
o	In House Training SNI ISO 17025 : 2017	√	√	√	√	√	√
p	In House Training SNI ISO 17065 : 2012	√	√	√	√	√	√
q	Monitoring Penerapan Mutu Hasil Perikanan di Poklhasar se – Kalimantan Barat	√	√	√	√	√	√
r	Pengujian Laboratorium Sampel Produk Hasil Perikanan dan Hasil Olahan di Pasar-Pasar Se-Kalbar	√	√	√	√	√	√
s	Penerapan Mutu pada Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	√	√	√	√	√	√
XI	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	√	√	√	√	√	√
a	Jejaring Kawasan Konservasi	√	√	√	√	√	√
b	Pengembangan dan Pembinaan Desa Mandiri di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√	√
c	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	√	√	√	√	√	√
d	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	√	√	√	√	√	√

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 TAHUN 2019



No.	Program &Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
e	Rapat Teknis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara Berkelanjutan	√	√	√	√	√	√
f	Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Budaya Kelautan dan Perikanan kepada Masyarakat Kalimantan Barat	√	√	√	√	√	√
g	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi	√	√	√	√	√	√
h	Rehabilitasi Kawasan konservasi di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	√	√	√	√	√	√
i	Festival Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalbar Berbasis Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√	√
j	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil (DAK)	√	√	√	√	√	√

Keterangan	
Ada	√
Tidak Ada	x



BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

1. Ringkasan Urusan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

Dalam rangka melaksanakan Urusan Pilihan sektor Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan melaksanakan sebanyak 11 program dan 90 kegiatan setelah revisi dan penghematan dengan urutan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 15 kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 13 kegiatan
3. Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terdiri dari 6 kegiatan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 8 kegiatan
6. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan
7. Program Pengembangan Perikanan Budidaya yang terdiri dari 11 kegiatan
8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap yang terdiri dari 10 kegiatan
9. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 6 kegiatan
10. Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan yang terdiri dari 8 kegiatan
11. Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terdiri dari 10 kegiatan

2. Ringkasan Urusan UPTD

➤ UPT Pelabuhan Perikanan

Dalam rangka melaksanakan Urusan Pilihan sektor Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi UPT Pelabuhan Perikanan Provinsi



Kalimantan Barat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan melaksanakan sebanyak 7 program dan 48 kegiatan setelah revisi dan penghematan dengan urutan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 11 kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 19 kegiatan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terdiri dari 4 kegiatan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 3 kegiatan
6. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan
7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap yang terdiri dari 9 kegiatan

➤ **UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPT PMHP)**

Dalam rangka melaksanakan Urusan Pilihan sektor Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi UPT PMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan melaksanakan sebanyak 7 program dan 44 kegiatan setelah revisi dan penghematan dengan urutan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 11 kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 10 kegiatan
3. Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terdiri dari 5 kegiatan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 5 kegiatan
6. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan
7. Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan yang terdiri dari 11 kegiatan

➤ **UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT PBAPL)**

Dalam rangka melaksanakan Urusan Pilihan sektor Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi UPT PBAPL Dinas Kelautan dan



Perikanan Provinsi Kalimantan melaksanakan sebanyak 5 program dan 43 kegiatan setelah revisi dan penghematan dengan urutan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 12 kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 13 kegiatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terdiri dari 3 kegiatan
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 4 kegiatan
5. Program Pengembangan Perikanan Budidaya yang terdiri dari 11 kegiatan

B. Anggaran Belanja dan Realisasi SKPD dan UPTD SKPD

Total alokasi dan realisasi dana APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 (**Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Pelabuhan Perikanan, UPT PMHP dan UPT PBAPL Provinsi Kalimantan Barat**) sebagaimana pada *Tabel 5*.

Kode Rekening	Instansi/organisasi	Anggaran Belanja	Realisasi				Total Realisasi Belanja	%
			Realisasi Belanja TL	Jenis Belanja				
				Pemeliharaan	Barang & Jasa	Modal		
Total SKPD		44,796,886,376	14,243,228,025	1,137,585,313	15,586,078,999	9,159,715,197	41,668,060,221	93.02
2.05.01.01	Tidak langsung	15,124,585,342	14,243,228,025				13.841.137.008	99,28
	Dinas	12,727,566,865	-	337,018,850	9,740,939,627	382,125,000	12,130,972,627	95.31
2.05.01.06	UPT Pelabuhan Perikanan	10,685,747,700	-	654,588,713	2,225,982,906	7,145,960,747	9,576,103,653	89.62
2.05.01.06	UPT PMHP	1,992,740,280	-	70,961,000	1,399,844,998	159,950,000	1,794,174,998	90.04
2.05.01.07	UPT PBAPL	4,266,246,189	-	75,016,750	2,219,311,468	1,471,679,450	3,923,580,918	91.97

C. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sesuai Permendagri 100 Tahun 2018 Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan Sosial. Namun pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu : pelayanan permintaan data baik yang berasal dari instansi lintas sektoral maupun dari kalangan akademik. Selain itu Dinas Kelautan



dan Perikanan juga melaksanakan penerbitan Pertimbangan Teknis/perizinan bagi pelaku usaha yang mengajukan dokumen perizinan bidang kelautan dan perikanan. Adapun capaian izin/pertimbangan teknis tahun 2019 yang dikeluarkan yang sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebagai berikut :

No.	Bidang	Jenis Pelayanan/ Pertimbangan Teknis / Perizinan/ Rekomendasi	Pemohonan Pengajuan	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Dokumen yang ditolak/ Batal
1	Perikanan Tangkap	Penerbitan :			
		a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	88	88	-
		b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	180	180	-
		c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	25	25	-
		d. Surat Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan (SIPUPI)/Andon	100	100	-
2	Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil	a. Rekomendasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)	35	28	7
		b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	14	10	4
4	UPT Pelabuhan Perikanan	a. Rekomendasi BBM	726	706	20
		b. Surat Persetujuan Berlayar	803	803	-
		c. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal	834	834	-
		d. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	495	495	-

Dokumen yang ditolak/batal penerbitan rekomendasinya karena adanya kekurangan/ ketidaksesuaian persyaratan dan kriteria yang tercantum dalam dokumen permohonan perizinan usaha perikanan sesuai ketentuan Peraturan Per Undang-Undang yang berlaku.



D. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja, terdapat beberapa masalah yang muncul beserta solusi atau langkah-langkah yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan induk, benih/benur masih dominan didatangkan dari luar Kalimantan Barat
2. Teknologi budidaya terutama payau dan laut masih rendah
3. Teknis Produksi Udang Windu = tingkat kelangsungan hidup (*Servival Rate / SR*) tiap fase dari mulai nauplius ke zoea kemudian mysis masih sangat rendah, walaupun angka produksi *Nauplius / Larva* sangat tinggi yaitu *Nauplius* sebanyak 25.500.000 Ekor, *Zoea Mysis* sebanyak 2.830.000 Ekor, *PL* sebanyak 1.163.500 Ekor. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya energy untuk berubah stadia diakibatkan kurangnya penggunaan pakan alami *Fitoplankton*.
4. Mortalitas Induk Udang Vannamei terlalu tinggi disebabkan pakan segar yang diadakan tidak bisa ditampung banyak karena tidak adanya tempat pembekuan seperti freezer yang memadai dan Rumah Induk Vannamei tidak sesuai persyaratan penempatan induk.
5. Teknis Produksi Pembesaran Udang Windu Air Tambak Sebangkau proses pembesaran udang udang windu terserang penyakit white spot yang menyebabkan kematian masal.
6. Masih ditemui pelanggaran penangkapan ikan (illegal Unreported dan Unregulated Fishing) baik oleh kapal ikan asing maupun domestik, serta penangkapan ikan dengan merusak kualitas lingkungan

- Solusi

Solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan pakan alternatif, bantuan induk kepada masyarakat serta bantuan sarana dan prasarana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk budidaya payau dan laut
2. Pemberdayaan lebih optimal kepada UPT PBAPL
3. Transfer teknologi ke masyarakat



4. Menyiapkan Bibit Murni Plankton pakan alami jenis *Skeletonema* agar selalu tersedia.
5. Pengadaan Freezer dan pengadaan rumah induk yang sesuai persyaratan kelayakan untuk penempatan Induk Udang Vannamei.
6. Untuk mengatasi penyakit White Spot Syndrome pada udang windu hingga saat ini belum ada obatnya, yang dapat dilakukan adalah mencegahnya. Pencegahan dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat stress dan menghindari terbentuknya luka pada kutikula, selain itu dengan cara menurunkan suhu air di tambak karena sintesis protein virus dipengaruhi oleh suhu, mengatur kualitas air, pengendalian vector dan karier, serta klorinasi air 30 ppm.
7. Peningkatan pengawasan secara terpadu dengan instansi-instansi vertikal yang mengawasi laut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Tim Sekretariat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Konflik Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Perairan Laut pada Titik 0 – 12 Mil Laut Provinsi Kalimantan Barat.

E. Hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada

F. Indikator Kinerja Kunci

1. Tataran Pengambil Kebijakan

Jumlah Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun 2019. Ada, yaitu Penghargaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) Kategori FORIKAN Kabupaten/Kota kepada Kabupaten Sanggau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

a. Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan dengan capaian kinerja 5 Program

Program yang berkaitan dengan urusan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sesuai kewenangan.

Jumlah program Kelautan dan Perikanan, sebanyak 5 Program

1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp. 3.047.523.250,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.940.139.475,-



2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp. 3.150.727.800,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.129.999.494,-
3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 715.796.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 689.788.259,-
4. Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 2.579.916.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.475.991.619,-
5. Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan anggaran sebesar Rp. 1.798.592.985,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.686.963.420,-

b. Keberadaan Standart Operating Procedure (SOP) Teknis : ada 63 SOP

1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. Penanganan Keberatan Informasi Publik
3. Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
4. Fasilitasi Sengketa Informasi
5. Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik
6. Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
7. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
8. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan
9. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan
10. Pelayanan Floating Repair
11. Masuk Pelabuhan Perikanan Security Dan Keamanan Aset
12. Kebersihan Lingkungan Pelabuhan Perikanan
13. Jasa Pengadaan Air Bersih
14. Pas Masuk Pelabuhan Harian
15. Pas Masuk Pelabuhan Perikanan Berlangganan
16. Penumpukan Barang
17. Sewa Lahan (Tanah) dan Bangunan
18. Penggunaan Crane House dan Crane Beroda
19. Inspeksi Pembongkaran Ikan
20. Pelayanan Logbook Penangkapan Ikan
21. Pelayanan Pengawasan Mutu
22. Monitoring dan Pengambilan Sampel Residu
23. Penilaian/Audit CPIB
24. Penilaian/Audit CBIB



25. Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)
26. Penjualan Ikan
27. Penyediaan Induk Ikan/Udang
28. Penyediaan Benih/Benur
29. Fasilitasi Magang
30. Penyediaan Hasil Uji Laboratorium
31. Penerbitan Sertifikat Magang
32. Penerimaan Sampel Uji
33. Pengujian Boraks
34. Pengujian Mikrobiologi Angka Lempeng Total (ALT)
35. Pengujian Mikrobiologi Escheria Coli
36. Pengujian Mikrobiologi Vibrio Cholerae (Metode Chemwel)
37. Pengujian Mikrobiologi Vibrio Parahaemolyticus
38. Pengujian Mikrobiologi Staphylococcus Aureus
39. Pengujian Organoleptik
40. Uji Suhu Pusat Ikan
41. Pengujian Fisika (Bobot Tuntas)
42. Pengujian Mikrobiologi Coliform
43. Bidang Pengujian Membran Filter (Kualitas Air Intercocci Intestinal)
44. Membran Filter Coliform
45. Membran Filter Escheria Coli
46. Pengujian Mikrobiologi Salmonella
47. Pengujian Listeria
48. Mikrobiologi Sampel Umum
49. Validasi Dan Verifikasi Metode Pengujian
50. Pengujian Uji Profisiensi
51. Pengujian Kadar Garam
52. Pengujian Kadar Abu
53. Pengujian Kadar Air
54. Pengujian Kadar Lemak Total
55. Pengujian Kadar Protein
56. Pengujian Kadar Logam Berat Kadmium (Cd)
57. Pengujian Serat Kasar
58. Pengujian Kadar Logam Berat Timbal (Pb)
59. Pengujian Kadar Logam Berat Merkuri (Hg)
60. Pengujian Residu Antibiotik Chlorampericol (Cap)
61. Pengujian Formalin
62. Pengujian Residu Antibiotik Aoz
63. Pengujian Residu Antibiotik Amoz



- c. Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraaau Urusan dengan capaian kinerja 100%**
Ada, Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2038
- d. Rasio Struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian kinerja 96,97 %**
- Jabatan yang terisi definitif sebanyak 32 Jabatan
 - Jabatan yang harus terisi definitif sebanyak 33 jabatan
- e. Keberadaan Jabatan Fungsional dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah dengan capaian Kinerja 6 pegawai fungsional.**
Pengawas perikanan bidang Pembudiyaan ikan 6 orang
- f. Rasio PNS Provinsi dengan capaian kinerja %**
Jumlah PNS di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan adalah 141 orang termasuk UPTD lingkup Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat
- g. Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja 87,50 %**
Jumlah Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan sebanyak 28 orang, dari pejabat yang ada sebanyak 32 orang
- h. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian kinerja 96,97 %**
Jumlah Pejabat yang telah memenuhi Persyaratan Kepangkatan sebanyak 32 orang dari 33 Jabatan Struktural
- i. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA-SKPD, DPA dengan capaian kinerja 3 jenis Dokumen**
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD sebanyak 3 dokumen yaitu :
1. Rencana Strategis SKPD
 2. Rencana Kerja SKPD
 3. RKA SKPD



j. Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam renja SKPD capaian kinerja 100%

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah
7. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
9. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
10. Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
11. Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

k. Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian kinerja 100%

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah
7. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
9. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
10. Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
11. Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

l. Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 100%

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah
7. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
9. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan



10. Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
11. Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

m. Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD

Alokasi anggaran Perangkat Daerah Rp. 44.796.886.376,-

n. Realisasi belanja Perangkat Daerah terhadap total realisasi belanja APBD

Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. 41.668.060.221,-

o. Total belanja langsung dari total belanja Perangkat Daerah

Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah 65,82 % dengan Total Belanja Langsung Rp. 27.424.832.196,- terhadap total belanja Perangkat Daerah Rp. 41.668.060.221,-

p. Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah

Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah 34,18% dengan total Belanja Tidak Langsung Rp. 14.243.228.025,- terhadap total belanja Perangkat Daerah Rp. 41.668.060.221,-

q. Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)

Ada 3 Jenis Dokumen : Neraca, CALK, LRA

r. Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah

Ada 6 Jenis Dokumen : KIB Tanah, KIB Peralatan dan Mesin, KIB Gedung dan Bangunan, KIB Jalan Irigasi dan Jaringan, KIB Aset Tetap Lainnya, KIB Konstruksi dalam Pengerjaan

s. Jumlah Aset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah

Jumlah Aset yang tidak digunakan SKPD 0 %, dengan Jumlah aset yang tidak digunakan . Rp. 0,- Terhadap Aset yang dikuasai SKPD senilai Rp. 26.033.300.643,-

t. Jumlah fasilitas/prasarana informasi sebanyak 5 jenis

- Papan Pengumuman
- Pos pengaduan
- Media website
- Leaflet
- Mobil Alih Teknologi Informasi (ATI)

u. Keberadaan survey kepuasan masyarakat

Ada, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



3. Tataran Pelaksana Kebijakan

No	Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
		Jumlah Total Produksi Perikanan (Ton)		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)		Ekspor Hasil Perikanan (Ton)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	6	7	9	10
1	Kabupaten Ketapang	42,935.00	34,721.33				
2	Kabupaten Mempawah	13,488.34	16,537.97				
3	Kabupaten Sambas	25,064.00	34,452.30				
4	Kabupateng Bengkayang	8,476.00	8,106.64				
5	Kota Singkawang	4,061.00	6,282.67				
6	Kota Pontianak	2,706.00	1,005.92				
7	Kabupaten Kayong Utara	35,434.00	24,791.34				
8	Kabupaten Kubu Raya	28,132.00	31,087.83				
9	Kabupaten Sanggau	9,293.00	8,528.81				
10	Kabupaten Landak	1,336.00	1,526.86				
11	Kabupaten Sekadau	2,325.00	1,902.28				
12	Kabupaten Melawi	6,999.00	5,194.21				
13	Kabupaten Sintang	3,581.00	3,158.13				
14	Kabupaten Kapuas Hulu	65,784.00	66,487.92				
JUMLAH		249,614.34	243,784.21	65.00	61.60	-	1,970.00

*Data tahun 2019



B A B. IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Andon Provinsi Jawa Tengah

1. Daerah yang diajak kerjasama adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 523.33/2400/2018 dan 027/713/DKP-PT.
2. Dasar Hukum kerjasama adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 36/PERMEN-KP/2016 tentang Andon Penangkapan Ikan.
3. Kerjasama merupakan kerjasama sektor Kelautan dan Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap dengan objek hukum andon penangkapan ikan.
4. Nama kegiatan yaitu Perluasan Usaha Penangkapan Ikan/Andon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dari Bidang yang melaksanakan kerjasama adalah sebagai berikut :

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	
		Org			Org
S2	3	Org		1	Org
S1/DIV	2	Org	Pembina Tingkat I	1	Org
DIPLOMA III	-	Org	Penata Tingkat I	2	Org
DIPLOMA II	-	Org	Penata	1	Org
JUMLAH	5	Org	JUMLAH	5	Org

7. Sumber anggaran secara khusus untuk menangani kerjasama andon tidak ada.
8. Jangka waktu kerjasama adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 21 Agustus 2018 dan dapat dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali untuk perbaikan.
9. Hasil (output) dari kerjasama belum ada, karena belum ada perizinan/SIPI andon dari Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan ataupun sebaliknya, namun maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk pembinaan penangkapan ikan, penanganan perizinan serta pengawasan dan pengendalian andon penangkapan ikan.
10. Permasalahan dan solusi, tidak ada.
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan, tidak ada.



B. Kerjasama Andon Penangkapan Ikan dengan Provinsi Kepulauan Riau

1. Daerah yang diajak kerjasama adalah Provinsi Kepulauan Riau yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor 523/DKP-PT/001/XI/2019 dan 027/955/DKP-PT.
2. Dasar Hukum kerjasama adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 36/PERMEN-KP/2016 tentang Andon Penangkapan Ikan.
3. Kerjasama merupakan kerjasama sektor Kelautan dan Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap dengan objek hukum andon penangkapan ikan.
4. Nama kegiatan yaitu Perluasan Usaha Penangkapan Ikan/Andon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dari Bidang yang melaksanakan kerjasama adalah sebagai berikut :

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	
		Org			Org
S2	3	Org		1	Org
S1/DIV	2	Org	Pembina Tingkat I	1	Org
DIPLOMA III	-	Org	Penata Tingkat I	2	Org
DIPLOMA II	-	Org	Penata	1	Org
JUMLAH	5	Org	JUMLAH	5	Org

7. Sumber anggaran secara khusus untuk menangani kerjasama andon tidak ada.
8. Jangka waktu kerjasama adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 2 November 2018 dan dapat dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali untuk perbaikan.
9. Hasil (output) dari kerjasama sudah ada perizinan/SIPI andon kapal dari Kepulauan Riau yang diterbitkan oleh Kalimantan Barat sebanyak 100 izin andon, dan sebaliknya Perizinan/SIPI andon kapal dari Kalimantan Barat yang diterbitkan oleh Kepulauan Riau sebanyak 54 izin andon. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk pembinaan penangkapan ikan, penanganan perizinan serta pengawasan dan pengendalian andon penangkapan ikan.
10. Permasalahan dan solusi
 - Permasalahan: permohonan andon Kepulauan Riau tidak terakomodir semua
 - Solusi : penambahan kuota Andon di tahun 2020



11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan, tidak ada.

C. Kerjasama Andon Penangkapan Ikan dengan Provinsi Jawa Barat

1. Daerah yang diajak kerjasama adalah Provinsi Jawa Barat yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan nomor 523.411/11546/Tangkap dan 027/129/DKP_PT.
2. Dasar Hukum kerjasama adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 36/PERMEN-KP/2016 tentang Andon Penangkapan Ikan.
3. Kerjasama merupakan kerjasama sektor Kelautan dan Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap dengan objek hukum andon penangkapan ikan.
4. Nama kegiatan yaitu Perluasan Usaha Penangkapan Ikan/Andon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dari Bidang yang melaksanakan kerjasama adalah sebagai berikut :

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	
S2	3	Org		1	Org
S1/DIV	2	Org	Pembina Tingkat I	1	Org
DIPLOMA III	-	Org	Penata Tingkat I	2	Org
DIPLOMA II	-	Org	Penata	1	Org
JUMLAH	5	Org	JUMLAH	5	Org

7. Sumber anggaran secara khusus untuk menangani kerjasama andon tidak ada.
8. Jangka waktu kerjasama adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 20 Desember 2018 dan dapat dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali untuk perbaikan.
9. Hasil (output) dari kerjasama belum ada, karena belum ada perizinan/SIPI andon dari Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan ataupun sebaliknya, namun maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk pembinaan penangkapan ikan, penanganan perizinan serta pengawasan dan pengendalian andon penangkapan ikan.
10. Permasalahan dan solusi, tidak ada.
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan, tidak ada.



BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pada Tahun Anggaran 2019 secara umum telah dilaksanakan, baik yang ada pada bidang teknis maupun yang ada di UPTD lingkup dinas, sebagaimana telah dituangkan didalam renstra 2018-2023 dan renja dinas tahun 2019.

Indikator kinerja utama dinas yang mencakup volume produksi perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya) pada tahun anggaran 2019 telah tercapai sebesar 243.784,21 ton atau sebesar 97,66% dengan rincian perikanan tangkap sebesar 169.540,91 ton atau sebesar 102,37 % dan Perikanan Budidaya sebesar 74.243,30 ton atau sebesar 88,38% dari target yang telah ditetapkan. Angka divalidasi serentak secara nasional bulan Februari – Maret 2020.

Dampak positif secara langsung dari pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan ini antara lain; telah mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi baru pada sektor usaha kelautan dan perikanan beserta usaha pendukungnya, penyerapan tenaga kerja baru pada sektor perikanan, meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat Kalimantan Barat karena ketersediaan protein asal ikan tersedia secara cukup dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Namun demikian, tidak semua program dan kegiatan yang telah dicanangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa program dan kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus dan kerja keras secara sinergis lintas bidang dan lintas kabupaten / kota se- Kalbar agar capaian program yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan Kalimantan Barat yang lebih sejahtera. Sebagai contoh beberapa kegiatan yang perlu kerja keras bersama, antara lain; penyediaan calon induk ikan unggul dan benih ikan unggul bagi pembudidaya ikan secara berkecukupan, pembinaan teknis kelompok usaha perikanan, penguatan permodalan, masih terjadinya pencemaran dan pengrusakan sumberdaya kelautan dan perikanan, perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan, penguatan dalam pengelolaan data, informasi dan statistik kelautan dan perikanan se- Kalbar.



B. Saran

1. Pembinaan teknis kepada kelompok usaha perikanan (KUB, Pokdakan, Poklahsarkan, Pokmaswas) perlu dilakukan secara lebih intensif agar kelompok pelaku usaha perikanan Kalimantan Barat secara bertahap dapat tumbuh dan berkembang skala usahanya menjadi besar dan menguntungkan dengan melibatkan peran serta petugas teknis dinas yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota dan penyuluh perikanan se- Kalbar.
2. Dalam upaya meningkatkan skala usaha dan permodalan bagi kelompok usaha perikanan, dinas perlu memberdayakan secara optimal Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan penyuluh perikanan untuk pendampingan kelompok usaha perikanan mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan/perbankan, dimana sebagian besar kelompok usaha perikanan Kalbar pada saat ini masih kesulitan mendapat modal usaha dari lembaga keuangan/Bank.
3. Perlu mengintensifkan kegiatan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan dari berbagai aktifitas illegal dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar sumberdaya ikan Kalimantan Barat tetap lestari dan berkelanjutan .
4. Perlu terus melakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan serta habitatnya.
5. Perlu meningkatkan validitas dalam pengelolaan data dan statistik kelautan dan perikanan dengan meningkatkan skill dan koordinasi petugas pengumpul data statistik kelautan dan perikanan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten / kota se- Kalbar